

Pengembangan SDM antara Kepentingan Ekonomi dan Keutuhan Kebudayaan Minangkabau¹

Oleh : Nursyirwan Effendi²

Abstract

As far as the Minangkabau concerned, human resource development has been one of the most important aspect in cultural ideas for many years. This development is, however, not really significant in practice in the current time. There are some crucial problems among the Minangkabau in dealing with the acquisition process of such cultural ideas. In general, the Minangkabau are well known dynamic. Cultural orientation among the now-generation Minangkabau is changing as a result of such dynamics. Quality of education is noticed going lower than before. Religious principles are partly not an important basis of behavior any more. This article gives some stimulating ideas of how the human resource development among the Minangkabau are facing crucial problem. Ideally, such development could concern with economic importance and cultural importance at the same time. Practically, the Minangkabau deal with dual development in putting these both importances. In the light of this discourse, this article discusses interacting variables of economy, culture and human development.

*Budinya yang tinggi, keberaniannya dan elok susun katanya,
menyebabkan orang Minang lekas menarik hati orang. Otaknya cerdas
sebab dari kecil telah mendengar pepatah dan petitih
dan fatwa orang tua-tua...*

(Hamka, 1984: 55-56)

¹ PAPER ini pernah dipresentasikan pada Dialog Kebudayaan Minangkabau, pada tanggal 29, 30 september dan 1 Oktober 2005, di Hotel Inna Muara Padang. Acara ini diselenggarakan oleh Pemda Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.

² Penulis adalah staf pengajar Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas

A. Pendahuluan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk memancing diskusi lebih jauh tentang keberadaan kebudayaan Minangkabau dilihat dari fenomena kondisi sumber daya manusia dikalangan masyarakat Minangkabau selama ini. Asumsi makalah ini adalah perkembangan perilaku, sikap dan penerapan nilai budaya dalam masyarakat Minangkabau cenderung tidak ada pola dan arah yang jelas, apabila diukur dari idealisme tatanan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau yang telah diakui ada selama ini. Khususnya, kualitas SDM orang Minangkabau antara dahulu dan sekarang, telah jauh berbeda tingkatnya. Namun, tingkat perbedaan tersebut sekarang ini terkesan bukan semakin memperkuat keutuhan kebudayaan Minangkabau, justru perkembangan SDM cenderung mengarah kepada ketidakadaan prinsip untuk mempertahankan keutuhan kebudayaan Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat telah lama dikenal sebagai salah satu gudangnya orang pintar dan bijak di Indonesia. Kita semua sepakat dan bangga tentang hal itu, terlebih lagi dengan apa yang dinukilkan dari kutipan Hamka di atas, *Orang Minangkabau sangat berbudi dan cerdas*. Hamka pun mencatat bahwa Minangkabau telah mencapai zaman kebesaran dan kejayaan semasa 500 atau 600 tahun yang lalu (Hamka 1984:7). Di daerah ini revolusi pendidikan umum dan agama dimulai semenjak tahun 1930an, dan mencapai klimaksnya pada tahun 1980an. Selain itu, banyak orang Minangkabau yang memiliki nama dan kiprah besar di

wilayah orang lain. Karenanya Hamka bertanya: Mengapa orang-orang Minangkabau itu bisa menjadi besar di luar nagarinya sendiri? (Hamka 1984: 55).

„Jiwa orang Minang adalah ‚minang complex‘... dalam nagarinya sendiri terdapat beberapa hal yang menyebabkan dia mempunyai pribadi. Keindahan alamnya amat mempesona, sehingga hati puteranya amat terikat kepada daerahnya itu. Adatnya kokoh bersandar kepada ibu. Menjadi kemegahan sebelum mata terbuka. Tetapi apabila laki-lakinya telah membuka mata dan merantau ke tempat lain mereka merasa bahwa di kampung halamannya sendiri mereka tidak mempunyai harta. Mereka tidak mempunyai rumah tempat tinggal. Mereka tidak mempunyai sawah ladang yang dipunyainya sendiri. Harta pusaka adalah kepunyaan kaum, gunung-ganang, lembah-tasik kepunyaan negeri. Yang kita punya sendiri tidak ada. Betatapun kekayaan yang didapat wajib dijadikan menambah harta-pusaka. Kepunyaan sendiri hanyalah yang lekat pada tubuh“.

Elizabeth E. Grave mencatat dalam konteks pendidikan, bahwa masyarakat Minangkabau telah lama menyerap salah satu bentuk *western culture* (budaya Barat) khususnya tentang kebijakan etis (*the ethical policy*). Orang Minangkabau menggunakannya untuk memperluas dan mempercepat

orientasi pendidikan mereka (Grave, 1971:6). Sebagai bukti, banyak orang Minangkabau yang telah lama berorientasi menjadi pegawai negeri, guru sekolah, dan profesi kesehatan. Selain itu, ia juga mencatat bahwa masyarakat Minangkabau, sebagai bagian dari karakter orang Sumatera pada umumnya, adalah masyarakat yang sangat dinamis dan berorientasi komersial (*commercially oriented people*) baik di daerahnya sendiri, di dalam arena politik kekuasaan internasional ataupun dalam tingkat individual (*individual achievement*) (Grave, 1971: 17). Kondisi motivasi sosial serupa ini yang membuat orang Minangkabau pada masa lalu sangat cepat berkembang dan bergerak maju.

Gambaran di atas sekedar membuktikan bagaimana kita pada masa dahulu. Lalu, bagaimana orang Minangkabau dewasa ini?

B. Problema

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kita sepakat bahwa kita sekarang telah berubah, kita tidak seperti dulu, dikiaskan dengan pepatah berikut ini:

*"Dahulu rabab nan batangkai,
Kini langgundi nan babungo,
Dahulu Adat nan bapakai,
Kini lah (rodi) pitih nan paguno"*
(adaptasi dari Hamka 1984:99)

Paling tidak dalam dua dekade terakhir, kita mengalami dinamika yang sangat hebat dalam segala hal, baik ekonomi, politik maupun pendidikan, namun dinamika tersebut cenderung menampilkan grafik yang menurun. Naik turun kualitas pendidikan (formal dan informal) pada awal tahun 1980an

sampai 2000an sangat nyata, dengan berbagai kasus mulai muncul dipermukaan seperti pendidikan surau tidak lagi semarak, mesjid dan surau mulai lengang, remaja tidak lagi berorientasi kepada kitab Al Qur'an melainkan "kitab-kitab" sekuler lain, orang-orang pintar Minangkabau tidak lagi banyak yang muncul dalam skala politik nasional, gerakan *brain drain* (arus pindah orang-orang pintar potensial) ke ranah lain karena *kampung* tidak lagi kondusif bagi keberadaan pendidikan, ekonomi masyarakat lokal tidak berkembang dan beranjak dari skala menengah dan kecil sementara pelaku ekonomi kelas besar (kapitalis) semakin *beriaju jalang* di kampung kita. Gagasan-gagasan hebat membangun kampung tidak semua bisa terwujud. Kalaupun terwujud kitapun tidak sebagai pemilik, tetapi pelengkap. Investasi besar ekonomi yang ada di kampung kita, berasal dari orang luar.

Lalu kemana kita sebenarnya berubah sekarang?

Secara teori (kuno), dua orang antropolog mengingatkan tentang arah perubahan yaitu berevolusi siklus dan berubah kearah kemunduran

A.R.J. Turgot (Perancis) (1721-1891) yang mengemukakan teori evolusi siklus, bahwa (1) sifat aneka warna manusia di dunia ini tidak karena perbedaan biologis tetapi karena perbedaan lingkungan alam dan pendidikan, (2) manusia dalam masyarakatnya maju sampai tercapai suatu situasi dimana masyarakat itu akan menyebabkan kemundurannya sendiri.

W. Robertson (1777) "the infancy of social life", teori tentang

kemajuan kebudayaan manusia. Menurutnya aneka warna kebudayaan yang tampak pada bangsa-bangsa di muka bumi tidak disebabkan karena mereka berasal dari jenis makhluk yang berbeda, melainkan karena terpengaruh lingkungan alam yang berbeda-beda dan proses belajar yang berbeda-beda.

Kedua tori tersebut menekankan bahwa kualitas manusia bergantung kepada masyarakatnya sendiri, keada pengaruh lingkungan dan keada proses pendidikan di dalam dan di sekitar mereka. Kita mungkin seakat dengan pendapat tersebut.

Lalu apakah kita menyadari keadaan tentang arah perkembangan kita sekarang?

Semenjak masuknya arus globalisasi melalui peran komunikasi dan jalur informasi modern, maka batas-batas sosial kita semakin kabur, meskipun interaksi sosial semakin berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya komunitas-komunitas baru di luar batas kesatuan identitas sosial yang ada, artinya kesatuan sosial tidak lagi dikat oleh batas-batas nagari, suku atau kaum. Ikatan social sudah berkembang kearah kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi, atau kepentingan lainnya yang kadang-kadang tak masuk akal.

Sementara ini, sejalan dengan perkembangan IPTEK, keberadaan peralatan canggih untuk menopang kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat justru melahirkan perilaku canggung terhadap teknologi dan sosial. Dalam teknologi ada istilah *gagak* (gagap teknologi) dalam aspek sosial juga muncul *gasos* (gagap sosial). Lihat saja misalnya semenjak masuknya Hypermarket

(Plaza dan pasar modern lainnya) di kota Padang, masyarakat berubah ke arah yang tidak jelas, apabila diukur dari tuntutan nilai-nilai budaya Minangkabau. Anak-anak dan remaja lebih suka permainan elektronik dari pada bermain permainan rakyat seperti, *gasing*, *enggong*, *badia* dll. Remaja dan orangtua berekreasi dengan penampilan "kota" ke plaza daripada ke kampung atau nagari. Pemakaian benda-benda modern juga menggejala untuk memperkuat keberadaan identitas mereka

Namun apa yang salah dari kondisi tersebut? Aspek yang menonjol adalah perilaku dan pola pikir mereka tentang perubahan tersebut adalah serba menanggung (*manenggung*). Kita disebut masyarakat modern, tapi belum pas, namun tidak pula lagi mau dikatakan sebagai masyarakat tradisional. Kelihatannya, masyarakat Minangkabau masih setia kepada identitas budayannya, namun ditarik dengan umpan-umpan identitas global. Di satu sisi, banyak yang ingin menjadi seperti *orang modern*, seperti gaya hidup kota, tetapi di sisi lain kemampuan finansial mereka berhadapan dengan tuntutan kekuatan pasar modern masih tergolong lemah,

C. Sumber Daya Manusia dan Keutuhan Budaya

Kampung awak memiliki semua yang dibutuhkan untuk pengembangan sumber daya manusia. Kita punya sejumlah besar pranata pendidikan, baik swasta maupun negeri, kita punya beberapa

sumber daya alam yang strategis, tambang dsb, kita punya banyak cerdas pandai, kita punya koneksi ekonomi yang baik sampai ke manca negara, dan kita punya budaya yang luhur dan unik. Tetapi kenapa kita belum mengarah kepada puncak kemajuan? Malahan kita cenderung menurun?

Apakah ada persoalan dalam pengembangan ekonomi dan SDM kita?

Kita perlu ingat kepada dua aspek mendasar dalam mengelola SDM yaitu (1) kesiapan individu untuk dapat hidup dalam lingkungan social (*partisipasi social*) dan (2) kemampuan menguasai pedoman bertingkah laku (*codes of behavior*) untuk terus maju dan berkembang.

Untuk menghasilkan SDM, mengacu kepada poin pertama di atas, diperlukan proses sosialisasi, dan untuk menghasilkan SDM mengacu kepada poin kedua, diperlukan proses enkulturasi (pembudayaan). Sosialisasi adalah suatu proses dengan mana individu-individu dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam sistem social. Sosialisasi diidentikkan dengan proses membangun perkembangan anak dan suatu proses sepanjang hidup yang menyebabkan individu-individu membutuhkan peran-peran baru dan menyesuaikannya dengan peran-peran yang telah hilang atau usang. Intinya, sosialisasi adalah suatu proses dengan mana kita menciptakan "diri social" (*self social*) dan kepekaan untuk bersandar kepada system social melalui partisipasi di dalam system tersebut dan berinteraksi dengan yang lain (Johnson, 1995:267).

Enkulturasasi adalah proses dimana individu membutuhkan representasi mental (seperti kepercayaan, pengetahuan, nilai dll) dan pola-pola tingkah laku yang dibutuhkan untuk dapat berfungsi sebagai anggota dari suatu kebudayaan. Enkulturasasi dipahami sebagai proses pelatihan dan pendidikan seorang anak untuk akhirnya ia menjadi bagian yang integral dalam suatu kebudayaan (Barfield, 1997: 149).

Inti dari pengembangan SDM adalah untuk siap berpartisipasi dalam lingkup sosialnya dan berintegrasi dalam kebudayaannya. Hal ini berarti pengembangan SDM dalam konteks Minangkabau adalah agar seorang individu dapat turu serta dalam mempertahankan system social dan menjaga serta mengembangkan kebudayaan.

Lalu pertanyaannya, apakah pendidikan di daerah kita sudah menghasilkan "ke-Minangkabauan"?

Ada tiga alasan utama mengapa pendidikan kita memerlukan arah "ke-Minangkabauan", yakni:

- 1. *Neoteny* proses ketergantungan yang besar dari manusia yang baru lahir sampai akhirnya dapat mampu dan cakap (*capable*) berperan serta dalam kehidupan sosial orang dewasa. Terlahir menjadi orang Minangkabau, maka sampai akhir hayat tetap menjadi orang Minangkabau.
- 2. Fleksibilitas yang terus berkembang dalam suatu perilaku yang adaptif, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku manusia (*codes for behavior*) terus menerus berubah di seluruh masyarakat dari waktu ke waktu. Code

of behavior tidak selalu *fixed*, tetapi *flexible*. Meskipun pedoman perilaku masyarakat Minangkabau berubah, tetapi arahnya tetap kepada pedoman dasar nilai budaya Minangkabau.

- 3. Kemampuan (*ability*) belajar dari manusia yang dibutuhkan untuk memfasilitasi proses pembudayaan, karenanya terdapat berbagai variasi proses pembelajaran (*learning process*). Ini artinya, pengembangan variasi proses belajar dimungkinkan, tetapi tetap berorientasi kepada tujuan yang jelas.

Tiga bentuk pendidikan (*learning*) yang dekat dengan karakter manusia adalah

- a. *situational learning*: individu menyesuaikan diri terhadap pengalaman langsung.
- b. *social learning*: individu belajar melalui proses stimulus dan respon
- c. *symbolic learning*: individu belajar berdasarkan kapasitas bahasa yang dimiliki dan kemampuan menggunakan dan memahami simbol-simbol.

Intinya, proses pendidikan dalam konteks Minangkabau, meskipun berubah, bervariasi dan fleksibel perlu memiliki tujuan utama yakni memelihara keutuhan budaya.

D. Kebudayaan atau Ekonomi?

Pengembangan pendidikan dan IPTEK di daerah kita untuk keutuhan budaya atau kepentingan ekonomi?

Beberapa interpretasi yang dapat dikemukakan berdasar kepada pertanyaan ini adalah tentang pola hubungan antara kebudayaan (Minangkabau) dengan ekonomi, khususnya aspek pasar. Pertama, kebudayaan dianggap sebagai prinsip dari institusi dalam masyarakat. Artinya, kebudayaan menjadi pedoman bagi eksistensi institusi lainnya dalam masyarakat termasuk institusi ekonomi.

Kedua, interpretasi yang menempatkan azas interaktif egaliter bahwa kebudayaan dan ekonomi masing-masing merupakan institusi tersendiri dalam masyarakat, namun keduanya saling berhubungan.

Ketiga, interpretasi yang memandang bahwa kebudayaan adalah sub-sistem dari sistem ekonomi. Dalam konteks ini ekonomi merupakan inti (*core*) dari masyarakat. Interpretasi yang keempat adalah menempatkan sistem ekonomi ter-subordinasi dan terikat kuat dalam sistem kebudayaan baik dalam tatanan gagasan, maupun dalam implementasi.

Secara antropologis, keempat interpretasi di atas dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Ekonomi merupakan bagian dari kebudayaan. Asumsinya adalah ada metafora bahwa ekonomi terbelenggu (*embedded*) didalam kebudayaan dan masyarakat (Granovetter 1985). Artinya, kebudayaan adalah kerangka yang lebih besar yang memasukkan elemen ekonomi kedalamnya. Konsekuensinya, tindakan ekonomi akan berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, dan antar kebudayaan berlangsung proses

- transmisi, belajar dan pendidikan serta keahlian, dsb.
- b. Kebudayaan adalah bagian dari ekonomi dalam arti luas. Asumsi dari pernyataan ini adalah, kebudayaan yang muncul adalah untuk patuh dan tunduk kepada prinsip-prinsip ekonomi. Implikasi dari ini, ekonomi mengacu kepada dan menjadi acuan seluruh sistem kehidupan.
 - c. Kebudayaan dan ekonomi merupakan entitas yang terpisah, tanpa memasukkan satu dan lainnya, tetapi terdapat interaksi diantara keduanya. (Schlee 1999: 3). Asumsi dari pernyataan ini adalah kebudayaan dan ekonomi mengalami proses interrelasi yang seimbang dan bersifat produktivitas mutual (*mutually generative*) (Effendi 1999). Implikasi dari pemikiran ini adalah kebudayaan dapat saja membatasi opsi-opsi ekonomis karena aktor atau individu terbelenggu di dalam sistem norma masyarakatnya. Artinya kebudayaan dapat membatasi kemampuan individu untuk tindakan maksimisasi guna mencapai kepuasan-kepuasan material.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, saya berpandangan bahwa hubungan antara kebudayaan Minangkabau dan ekonomi adalah terdapat pada formulasi pernyataan pertama (ekonomi bagian dari kebudayaan) diatas, dan realitas hubungannya terdapat dalam konteks masyarakat nagari. Konteks ini sangat penting oleh karena nagari adalah medium sosial yang konkrit untuk mencermati berlangsungnya korelasi antara ber-

bagai pranata dalam masyarakat Minangkabau, termasuk antara kebudayaan dan ekonomi.³

Persoalan yang mengemuka pada masyarakat nagari dewasa ini adalah pada tatanan tindakan, sekarang ini ada tekanan kuat dari opsi ekonomi, di satu pihak, dan melemahnya opsi kebudayaan, di pihak lain. Keduanya namun secara natural terus berhubungan dalam pola yang nampaknya dialektis (kalau tidak antagonis). Pada tatanan ideasional terformulasi suatu problem bahwa ada proses melemahnya simbol-simbol kebudayaan Minangkabau akibat penetrasi simbol-simbol ekonomi yang merasuk ke dalam hampir keseluruhan aspek kehidupan. Faktanya, secara umum, dalam kacamata global, ekonomi pasar global dan peran dominan dari negara (*state*) sebagai satu-satunya institusi penentu perkembangan dan perubahan masyarakat sangat jelas terlihat.⁴ Realitas serupa ini

³ Alfidi (1992) secara tegas menyatakan bahwa nagari adalah representasi tiga institusi utama yakni agama (disimbolkan oleh mesjid), politik (disimbolkan oleh hulu adat) dan ekonomi (disimbolkan oleh balai) (halaman 18).

⁴ Sejak zaman kolonial Belanda, zaman merdeka dan era Orde Baru, bahkan sampai sekarang di era reformasi, masyarakat Minangkabau adalah sebagian masyarakat Indonesia yang mengalami perubahan sosial dan budaya atas dasar kemauan pemerintah (*state*), dan bukan atas kehendak serta aspirasi orang Minangkabau sendiri. Buku yang paling kuat, pada era Orde Baru, adalah perubahan kepemimpinan dan struktur kekuasaan lokal dalam pembangunan dari birokrasi "tradisional" ke "modern" (Alfidi 1992; Manan 1995).

mengkontribusikan suatu kompleksitas sendiri bagi pola interrelasi antara ekonomi dan kebudayaan dalam masyarakat Minangkabau. Dalam tingkatan tertentu, orang Minangkabau seringkali dianggap ambigu ketika dihadapkan dengan opsi ekonomi dan kebudayaan ketika menghadapi perubahan yang terjadi. Namun, menurut saya, keambiguan tersebut bukan cerminan dari ketidakmampuan dalam memutuskan salah satu opsi tersebut, melainkan cerminan dari adanya kompleksitas masalah yang sedang terjadi di dalam masyarakatnya, misalnya soal krisis identitas dan solidaritas sosial, melemahnya struktur sosial, dan penurunan kapasitas intelektual masyarakat, dan menipisnya peran agama dalam masyarakat.

E. Perilaku Masyarakat Minangkabau dewasa ini sebagai salah satu karakter kuat Ekonomi

Korelasi antara kebudayaan dan ekonomi adalah ekonomi berkekuatan sebagai satu potensi besar yang dapat merubah kebudayaan dari masyarakat nagari. Fakta yang sangat jelas akhir-akhir ini di dalam masyarakat kebanyakan dalam banyak anggota masyarakat di Sumatera Barat adalah berlangsungnya kecenderungan pola *consumerism-oriented behavior*. Salah satu inti dari perilaku tersebut adalah memanfaatkan atribut material untuk prestise dan peninggian status secara sengaja dan nyata (*visible*). Dewasa ini banyak anggota masyarakat yang merasa penting dan perlu untuk meminggirkan peran

nilai dan norma budaya sebagai basis dan acuan perilaku sosial dalam rangka meninggikan status ekonomi mereka. Banyak dari mereka yang sudah tidak begitu percaya bahwa atribut budaya bisa berfungsi meninggikan status seseorang. Ini artinya ada degradasi fungsi kebudayaan yang tengah berlangsung dalam masyarakat nagari.

Secara konseptual, Vago dalam bukunya *Social Change* (1996) berpendapat tentang terdapatnya stimulan sosial yang justru dapat merubah kebudayaan, seperti hasrat untuk memperoleh prestise (*desire for prestige*). Dalam setiap masyarakat ada sebagian tipe perilaku dan aktivitas yang sengaja dihargai lebih tinggi karena akan memberikan prestise dan status (halaman 203). Karenanya, setiap masyarakat memiliki dan mengembangkan pola perilaku yang berbeda untuk memperoleh suatu status atau prestise. Hasrat tersebut dianggap sarat dengan muatan dan motif ekonomi.

Dahulu untuk meninggikan status atau perilaku yang berprestise dan sangat dihargai, masyarakat nagari Minangkabau harus mampu menunjukkan pencapaian unsur-unsur non material yang seringkali bersifat simbolik, seperti kepandaian berpantun, menjadi ulama, guru mengaji, pemangku adat dsb. (lihat Hamka 1984).⁵ Dewasa ini, sejalan

⁵ Young juga sudah mensinyalir bahwa agama adalah basis bagi ikatan kebudayaan Minangkabau, banyak elit lokal yang sebenarnya tidak takut kehilangan atribut ekonomi mereka, tetapi justru mereka takut akan kehilangan

dengan pengaruh modernisasi, prestise dan status yang tinggi perlu dicari dan diperoleh melalui unsur material (*visible factors*), seperti baju, makanan, rumah dan mobil, pangkat, jabatan dsb. Konsekuensinya, tidak jarang kebudayaan Minangkabau diinstrumentalisasikan untuk pencapaian kepentingan-kepentingan ekonomis tersebut. Hal ini terbukti saat individu lebih sering mendahulukan kepentingan pribadi (*vested-interest*) daripada kepentingan komunal, namun berlingkungan dibalik kebudayaan.⁶

Fakta di atas memberi bukti bahwa dewasa ini pemahaman terhadap situasi (*situational learning*) untuk mencapai target ekonomis nampaknya lebih efektif daripada pemahaman terhadap situasi budaya (*cultural learning*). Ini artinya, kebanyakan orang lebih membutuhkan legitimasi dan pengakuan sosial atas dasar prestasi individual (*individual achievement*) dari pada pencapaian kolektif (*collective achievement*).

Pada konteks tersebut dapat dirasakan adanya kecenderungan yang semakin kuat dari masyarakat dimanapun mengalami dialektis antara sikap untuk mempertahankan diri dari kungkungan norma dan nilai kebudayaan dan sikap untuk melepaskan diri dari kungkungan

tersebut kearah perilaku alternatif yang lebih populis, dan dikategorikan sebagai perilaku masyarakat pasar. Perilaku alternatif tersebut memandang penting gaya hidup (*life style*) untuk mempertahankan eksistensi pribadi.⁷

Untuk konteks Minangkabau, Joel S. Kahn berpendapat bahwa secara nyata kontak langsung masyarakat semenjak lama telah berlangsung dengan ekonomi global melalui pasar-pasar lokal dan regional. Karenanya, banyak desa di

⁷ Istilah *lifestyle* pertama kali diperkenalkan dalam literatur sosiologi oleh Max Weber. Weber berasumsi bahwa status sosial ditentukan terutama oleh gaya hidup seseorang, bagaimana mengkonsumsi adalah lebih penting daripada apa yang diproduksi. Bensusan dan Vidich memberikan beberapa karakteristik gaya hidup kedalam lima klasifikasi yakni (1) *country gentleman*, yakni gaya hidup yang menekankan pada aktivitas sport atau laut; (2) *culture vulture*, yakni gaya hidup yang melibarkan diri pada aktivitas intelektual dan kultural; (3) *culture academic*, yakni menjadi bagian dari komunitas universitas, meskipun seseorang tidak seorang akademisi atau professor, bahkan menjadikan universitas sebagai tempat tinggal; (4) *fun-lover*, yakni gaya hidup yang seseorang yang lebih senang menjadi anggota dalam kelompok-kelompok sport, pesta, dansa, safari, terbang, dan ski. Mereka ikut serta hanya untuk kesenangan *fun* dan hidup dalam lingkaran jetset; (5) *vulgarian*, yakni gaya hidup yang menekankan pada penghamburan uang untuk mendapatkan status yang tinggi dalam masyarakat (*conspicuous consumption*). Perlu diingat bahwa karakteristik gaya hidup ini diacukan pada kelompok masyarakat kelas menengah atas (Vago 1996: 177-178).

pengikut yang berbasis agama (1994, lihat terutama bab 3).

⁶ Sepengetahuan saya, Di tahun 1990an, di Minangkabau marak dengan wacana tentang berbagai upacara adat dan para penghulu yang dipakai untuk kepentingan politik. Mereka terkesan hanya ditempatkan sebagai instrumen politik para penguasa.

Minangkabau melalui pasar lokal telah dihubungkan dengan dunia luar dan telah masuk dalam jaringan ekonomi dan pembagian kerja nasional dan internasional (Kahn 1980: 27 dan 75).⁶ Konsekuensinya, karena keberadaan pasar lokal, hampir tidak ada desa di Minangkabau yang independen dengan sistem ekonomi yang lebih luas (Kahn 1980; Effendi 1999: 16).

Tidak dipungkiri bahwa masyarakat Minangkabau telah lama terlibat dalam ekonomi tingkat global melalui mekanisme pasar (Oki 1977: 34-61). Oki menemukan salah satu bukti bahwa pada akhir abad ke 18 orang Minangkabau telah mengembangkan penanaman kopi untuk kepentingan pasar global, karena semakin meningkatnya permintaan kopi di pasar Eropa. Perkebunan kopi terus meluas antara tahun 1820an sampai 1830an, meskipun diiringi dengan pergolakan Padi yang berlangsung awal abad ke 19 (Oki 1977: 35). Pada masa itu perkebunan kopi banyak terdapat di daerah Rao, Maninjau dan Solok. Daerah-daerah tersebut sangat cocok untuk penanaman kopi jenis arabika yang diminati pasar global. Para pedagang yang ada di daerah-daerah tersebut seluruhnya adalah orang Minangkabau. Mereka mengekspor kopi ke luar negeri melalui jalur sungai ke pantai timur Sumatera melewati selat Malaka (Oki 1977: 35).

Secara empirik (keseharian), tidaklah mengherankan bahwa pe-

rilaku ekonomi merupakan bagian yang integral dari kehidupan keseharian sebagian besar orang Minangkabau.⁷ Karenanya, orang Minangkabau pedesaan nampaknya tidak menolak kehadiran pasar dan menganggap pasar sebagai institusi yang dapat diisi oleh intervensi sistem ekonomi yang lebih luas. Mereka menganggap pasar sebagai elemen yang integral terutama dalam masyarakat setingkat nagari. Secara struktural, pasar adalah pranata ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu syarat berdirinya sebuah nagari.

Secara teoritis, keberadaan pasar dalam masyarakat nagari, misalnya, membuat sebagian besar orang Minangkabau familiar dengan pola hidup komersial, dan bahkan, pasar menjadi nilai sosial tersendiri bagi perilaku sebagian besar masyarakat nagari. Ini artinya, tradisi berdagang dan tradisi pasar menjadi salah satu karakteristik sosial sebagian besar orang Minangkabau, terutama yang tinggal di pedesaan, untuk berperilaku ekonomi komersial.

Dobbin berpendapat bahwa menjelang abad ke 18 orang Minangkabau *darek* (daratan) mengalami kebangkitan ekonomi komersial dalam skala besar, melalui perdagangan, yang tidak hanya membawa kesejahteraan pada wilayah tersebut tetapi juga telah mempengaruhi pola perdagangan di wilayah tersebut (Dobbin 1977:1). Beberapa ahli seperti Abdullah (1972), Oki (1977) dan Kato (1982) mensinyalir bahwa pasar di

⁶ Pendapat Kahn di atas didasari pada penelitiannya tentang masyarakat pandai besi di Sungai Puar, Agam, antara tahun 1974-1976.

⁷ "*Pai ke pasar*" atau "*pai ke balai*" adalah ungkapan keseharian orang Minangkabau.

Minangkabau telah eksis sebelum periode perubahan ekonomi masyarakat besar-besaran yang ditandai dengan reaksi keras masyarakat melalui pemberontakan pajak pada awal abad ke 20.

Dalam uraian di atas dapat dinyatakan bahwa untuk melihat kekuatan ekonomi dalam kebudayaan Minangkabau, akan lebih mudah apabila kita mencermati penyelenggaraan suatu kekuatan pasar dalam masyarakat. Konsekuensi yang nyata akibat dari kekuatan ini adalah perubahan nilai dan norma. Dapat diamati bahwa sekarang terlihat jelas adanya ketidaksesuaian antara nilai dan norma yang terkandung dalam kebudayaan dengan perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat. Pada masa lalu, paling tidak tambo telah memberikan sinyalemen, bahwa orang Minangkabau dapat eksis dan jaya karena kekuatan kebudayaan dan kepatuhan masyarakatnya kepada kebudayaan, seperti halnya analogi pepatah berikut (Ahmad Dt. Batuah dan A. Dt. Madjoindo 1956: 39).

*Kemenakan beraja kepada mamak,
mamak beraja penghulu,
Penghulu beraja kepada mupakat,
mupakat beraja kepada kebenaran,
Menurut alur dan patut, serta baris
dan belebas, adat kawi tiap-tiap
nagari*

Masa lampau, berbagai pemimpin masyarakat bertanggung jawab sesuai dengan keahliannya masing-masing agar mekanisme masyarakat dapat berjalan dibawah pengaturan yang tidak tumpang tindih. Dalam pelaksanaan adat, misalnya, dikukuhkan seorang Raja

Adat di Buo, urusan agama dikenal Raja Ibadat di Sumpur Kudus, dan Radja Alam di Pagarruyung (Ahmad Dt. Batuah dan A. Dt. Madjoindo 1956: 35)

Pada hakekatnya, adat Minangkabau beserta identitas keislaman sangat penting bila seorang Minangkabau ingin memperoleh akuntabilitas publik di dalam masyarakat kaum atau nagarnya. Hal ini karena, kebudayaan Minangkabau mengakui adanya realitas ruang ganda yakni publik dan privat, dan realitas eksistensi pribadi dan kolektif. Seperti pepatah

*Adat nagari ada bersuku
Dalam suku berbuah perut
Buah perut ada tuonyo¹⁰*

Karenanya, dalam kebudayaan Minangkabau bidang publik (*public sphere*) tidak hanya dikontrol oleh legitimasi politik atau wacana atau bahkan perolehan ekonomi, melainkan juga pada legitimasi moral kolektif yang diakui bersama oleh anggota masyarakatnya karena adanya ikatan kekerabatan. Ini artinya, bidang publik akan ada dan eksis sepanjang moral budaya masih dipegang dan berfungsi kontrol. hukuman (*punishment*) adalah bukan pada sekedar tindakan individual yang benar atau salah, tetapi pada pelanggaran moral kolektif, seperti halnya mengabaikan *alur dan patut*. Akuntabilitas publik dalam konteks

¹⁰ Pepatah ini nampaknya bermakna bahwa urusan adat nagari juga urusan suku, dan urusan suku juga urusan paruik, dan urusan paruik juga karena ada yang tua. Ini artinya, urusan publik dan privat saling berhubungan.

ini adalah ukuran perilaku individu yang menempatkan kesadaran akan pentingnya alur dan patut.

Kebudayaan Minangkabau sangat erat syarat dengan simbol dan basa basi. Karenanya, pola interaksi simbolik adalah suatu kewajaran budaya. Perolehan material bagi orang Minangkabau akan menjadi lebih memiliki makna, bila diiringi oleh simbol budaya di dalamnya. Dalam berwacana interaksi simbolik dapat dicermati dari pola-pola *kato mandaki, kato mandata, kato melerang dan kato manurun*, atau *baso basi, hereang jo gendeang*.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa kebudayaan dan ekonomi dalam tatanan tertentu dapat diartikan sebagai pola interaksi yang simbolik dari kebudayaan masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Pepatah menggambarkan simbolisasi ekonomi:

Sawah bapiriang lah diagieh

balupak

Ladang babidang lah diagieh

baumpuak

Tanah nan sabidang lah diagieh

bamilik

(Dt. Rajo Penghulu 1978:9)

Kebudayaan tidak harus melakukan resistensi terhadap pengaruh ekonomi, tetapi kebudayaan dan ekonomi sendiri harus dapat saling berinteraksi sehingga melahirkan identitas tersendiri bagi masyarakat Minangkabau, selain keislaman yang juga menjadi identitas kunci.

Fakta menunjukkan bahwa orang Minangkabau gemar akan kalkulasi ekonomi dalam berbagai hal, seperti dua ungkapan dari *ukua jangko dalam adat*, yakni *nak labo*

buek lah marugi, dan *nak kayo kuwek mancaru* (Dt. Rajo Penghulu 1978: 19), namun tetap dalam koridor keminangkabauan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa (1) kebudayaan Minangkabau merupakan gagasan dan acuan perilaku, dan (2) kebudayaan Minangkabau sebagai simbol kondensitas masyarakatnya. Konsekuensinya, kebudayaan Minangkabau harus mampu menyediakan seperangkat nilai dan norma yang cocok untuk kelangsungan institusi ekonomi dalam masyarakat.

Akhirnya, perlu dipahami bahwa orang Minangkabau adalah tipe masyarakat yang masih konservatif namun senantiasa „transisional“ modern. Mereka gandrung akan identitas kontemporer yang materialis populis, tetapi khawatir apabila perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri mereka dapat mencabut mereka dari akar-akar sosial yang ada dalam masyarakat apabila akan memilih opsi lain. Orang Minangkabau takut kalau identitas kontemporer mereka tidak memiliki rujukan dan pengakuan dari kelompok sosial di nagari atau kampungnya sendiri. Kekhawatiran mereka masih terlihat bila mereka melaksanakan perhelatan atau upacara kematian anggota keluarga. Mereka cemas kalau acara mereka tidak dihadiri, dibantu dan diakui oleh sanak keluarga sekampung atau senagari. Dalam konteks budaya ekonomi, oleh karenanya, pola kolektivisme material lebih bisa diterima ditengah masyarakat Minangkabau, daripada individualisme material.

Apabila kita akan mendudukkan kembali nagari dalam masyarakat Minangkabau, maka kita harus men-

cermati aspek paling riil yang mengayut dalam segala perilaku orang Minangkabau, seperti konsumerisme, prestise, harta pribadi, dsb, sebagai cerminan dari kekuatan penetrasi pasar. Namun, tidak ada hak bagi kita untuk memangkas apa yang telah terjadi dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini. Kita perlu bertanggung jawab membenahi berbagai potensi negatif yang telah berkembang didalam masyarakat agar nagari dimasa datang dapat eksis.

Dari kacamata budaya, unsur ekonomi harus mengandung makna simbolik dan bukan semata sebagai instrumen azas utilitas, apalagi eksploitasi. Ini berguna agar masyarakat Minangkabau tidak terpelempang kedalam perseteruan dan konflik sosial yang sering dipicu oleh muatan sentimen ketimpangan ekonomi. Ekonomi dalam perspektif budaya berperan sebagai modal simbolik dalam interaksi sosial.

F. Kesimpulan

Makalah ini lebih bersifat memancing diskusi lebih jauh tentang keriasuan kita akan keutuhan kebudayaan Minangkabau. Pengembangan SDM dengan segala strategi dan konsekuensinya seringkali tidak dipertanyakan hasil akhirnya, yakni bagaimana kaitannya dengan eksistensi kebudayaan? Oleh karena itu, saya mempertanyakan apakah SDM yang telah dikembangkan di daerah kita oleh berbagai lembaga dan berkonsekuensi kepada perkembangan ekonomi daerah masih akan mempertahankan keutuhan budaya Min-

angkabau, atau memecah belah keutuhan tersebut?

Tidak ada larangan dan hambatan diri kita untuk berkembang, namun kalau perkembangannya tidak ada arah, tidak ada yang menjaga, atau tidak ada koridornya, maka kita perlu mempertanyakan perkembangan itu. Oleh karena eksistensi pendidikan, IPTEK dsb, terkait dengan eksistensi kebudayaan, maka produk SDM semestinya justru memperkuat kebudayaan, dan bukan memperlemah kebudayaan. Hal ini berarti bahwa koridor perkembangan Pendidikan, IPTEK, ekonomi dsb, adalah kebudayaan.

Sejauh ini, kekuatan kebudayaan sebagai landasan pijak dan cengkeraman perkembangan "*hing-gok mancakam, tabang basitumpu*", justru melemah dengan munculnya kekuatan ekonomi pasar. Kekuatan ekonomi ini adalah mengesampingkan nilai lokal, dengan menggantinya kepada nilai ekonomi konsumtif dan nilai individual materialistik. Kesadaran kita akan kondisi ini perlu dipertebal, agar kita mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Akhirnya, kekuatan masyarakat Minangkabau adalah kepada keutuhan kebudayaannya. Keutuhan tersebut terletak kepada partisipasi dan kemampuan kita menjaganya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1966: "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau". *Indonesia*, No. 2. Pp. 1-24
- Abdullah, Taufik. 1972: "Modernization in the Minangkabau World". Dalam: *Culture and Politics in Indonesia*, edited by Claire Holt. Ithaca and London: Cornell University Press. Pp.179 – 245
- Ahmad Dt. Batuah dan A. Dt. Madjoindo. 1956. *Tambo Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka
- Alfitri. 1992. *Kepemimpinan dan Struktur Kekuasaan Lokal dalam Pembangunan*. Tesis S2 pada Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Barfield, Thomas. 1997. *The Dictionary of Anthropology*. Oxford: Blackwell Publishers
- Dobbin, Christine. 1977. „Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Padri Movement, 1784-1830". Dalam *Indonesia*: 23
- Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy. 1978. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: CV Rosda
- Effendi, Nursyirwan. 1997. „ Pasar dan Fungsi Kebudayaan". Dalam: *Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia*, diedit oleh E.K.M. Masinambow. Jakarta: Asosiasi Antropologi Indonesia dan Yayasan Obor
- Effendi, Nursyirwan. 1999. *Minangkabau Rural Markets: Their System, Roles and Functions in the Market Community of West Sumatra, Indonesia*. Disertasi pada Faculty of Sociology, University of Bielefeld, Germany
- Granovetter, Mark. 1985. „Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness". Dalam: *AJS*. Vol. 91. No. 3. Halaman 481-510
- Grave, Elizabeth E. 1971. *The Ever-victorious Buffalo:How the Minangkabau of Indonesia solved Their 'colonial question'*. Dissertation of University of Winsconsin
- Hamka. 1984. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas
- Josselin de Jong, P.E. de. 1952: *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. Martinus Nijhoff, The Hague
- Manan, Imran. 1995. *Birokrasi Moderen dan Otoritas Tradisional di Minangkabau (Nagari dan desa di Minangkabau)*. Padang: Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau
- Kahn, Joel S..1980: *Minangkabau Social Formations: Indonesian Peasant and the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Kato, Tsuyoshi. 1982: *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press
- LKAAM Lintau Buo. 1996: *Lintau Buo Membangun*. Padang: PT Media Alam Lestari

- Naim, Mochtar. 1990. "Nagari versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural". Dalam *Nagari, Desa dari Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*. Padang: Yayasan Genta Budaya
- Oki, Akira. 1977. *Social Change in the West Sumatran Village: 1908-1945*. Disertasi pada the Australian National University
- Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation*. Boston: Beacon
- Polanyi, Karl. 1988. „Ekonomi sebagai Proses Sosial”. Dalam *Toori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Radjab, Muhammad. 1969: *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Center for Minangkabau Studies Press
- Schlee, Günther. 1999. *Examiner's Report on the Doctoral Thesis of „Minangkabau Rural Markets: Their System, Roles and Functions in the Market Community of West Sumatra/Indonesia*. Faculty of Sociology - University of Bielefeld, Germany
- Vago, Steven. 1996. *Social Change*. New Jersey: Prentice Hall
- Young, Ken. 1994. *Islamic Peasant and the State: The 1908 Anti-Tax Rebellion in West Sumatra*. Monograph 40 Yale Southeast Asia Studies